

Survei IMF

PANDANGAN ATAS PEREKONOMIAN KAWASAN

Asia Bisa Mengambil Langkah-langkah untuk Meningkatkan Ketahanan Ditengah-tengah Penurunan Ekonomi

Survei IMF

9 Oktober 2015



Pekerja di pabrik baja di Jiaying, Provinsi Zhejiang, Cina: Turunnya harga komoditas adalah penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi Asia (foto: William Hong / Reuters / Corbis)

- Kawasan ini menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang
- Pertumbuhan sedang menurun meskipun masih relatif kuat dibandingkan dengan negara -negara lain
- Akomodasi kebijakan harus dipertimbangkan di mana ada ruang kebijakan

Komentar: Pertumbuhan sedang menurun di Asia, namun kawasan ini akan terus mengungguli perekonomian global lainnya, demikian menurut laporan IMF tentang perekonomian Asia yang dirilis pada tanggal 9 Oktober di Lima, Peru sebagai bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia.

Menurut laporan *Pandangan Terbaru atas Perekonomian Kawasan (PTPK) Asia dan Pasifik* edisi Oktober 2015 tersebut, pertumbuhan akan menurun sedikit menjadi 5,4 persen di tahun 2015-16, sejalan dengan perkembangan global (lihat tabel). "Konsumsi domestik, didukung dengan pasar tenaga kerja yang kuat dan harga energi yang lebih rendah, akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, dan pemulihan di negara maju akan memberikan dorongan selanjutnya," demikian menurut Changyong Rhee, Direktur IMF untuk kawasan Asia dan Pasifik.

Laporan ini juga mencatat bahwa dampak negatif dari pertumbuhan Cina yang mempengaruhi ke seluruh kawasan ini mungkin lebih besar daripada yang diantisipasi sebelumnya, dan tingkat ekspor terus menurun dibanding dengan pertumbuhan global. Walaupun penyeimbangan kembali permintaan (*demand*) impor China merupakan salah satu penyebabnya, kelemahan yang meluas terhadap *demand* impor global juga menjadi faktor utama di balik penurunan perdagangan di Asia.

Prospek pertumbuhan di dalam kawasan Asia sekali lagi mungkin akan berbeda, termasuk negara-negara yang berekonomi terbesar. Perekonomian Cina akan terus melakukan penyeimbangan kembali ke arah konsumsi domestik dan diperkirakan akan tumbuh sebanyak 6,8 persen pada tahun 2015, dan 6,3 persen pada tahun 2016 (tidak ada perubahannya relatif terhadap *Pandangan atas Perekonomian Dunia* bulan April 2015). Gejolak pasar ekuitas baru-baru ini serta perubahan rezim nilai tukar diperkirakan tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan jangka pendek. Namun, "kebijakan yang diperlukan untuk

mengatasi kerentanan dan penyeimbangan kembali perekonomian, cenderung akan mengurangi pertumbuhan utama, sambil memastikan keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka menengah," demikian menurut Changyong Rhee.

Di Jepang, pertumbuhan diproyeksikan akan pulih pada tingkat 0,6 persen pada tahun 2015 dan 1 persen pada tahun 2016, didukung oleh pemulihan konsumsi yang didorong oleh gaji, dan yang didukung oleh perkembangan moderat dalam investasi dan ekspor. *Demand* domestik juga seharusnya meningkat akibat turunnya harga minyak dan komoditas serta akibat kebijakan Bank Jepang yang akomodatif.

Di India, pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung diharapkan akan didukung oleh harga minyak yang lebih rendah dan *demand* domestik yang kuat, dan PDB diperkirakan akan naik 7,3 persen di tahun 2015, dan meningkat 7,5 persen di tahun 2016.

Pertumbuhan di negara-negara ekonomi utama ASEAN diperkirakan akan menurun pada tahun 2015-16, yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk harga komoditas yang lebih rendah (Indonesia dan Malaysia), ketidakpastian politik (Malaysia), dan pertumbuhan yang melemah di Cina.

Resiko penurunan terus mendominasi

Dalam *laporan PTPK* tersebut, dibahas resiko menurunnya pertumbuhan di kawasan ini, terutama kemungkinan adanya penurunan yang lebih tajam lagi di Cina, serta adanya dampak akibat perubahan komposisi *demand*. Nilai dolar AS yang terus menguat disertai dengan pengetatan mendadak dalam kondisi keuangan global, pertumbuhan yang menurun di Jepang, dan potensi pertumbuhan yang menurun di banyak negara di kawasan ini, merupakan faktor resiko tambahan yang mampu meredupkan prospek pertumbuhan Asia. "Tingkat hutang per ekuitas (*leverage*) yang tinggi juga akan bisa mengakibatkan guncangan yang semakin parah, terutama jika suku bunga domestik melonjak saat kondisi keuangan global mengencang", demikian menurut Changyong Rhee. Harga komoditas yang lebih rendah mengindikasikan adanya resiko penurunan lainnya, dengan implikasi yang merugikan bagi investasi perusahaan dalam sektor-sektor utama yang memproduksi komoditas, demikian menurut para penulis *laporan PTPK* tersebut.

Rekomendasi kebijakan

"Kebijakan-kebijakan akomodatif harus dipertimbangkan di mana ada tersedia ruang kebijakan, namun kompromi harus diutamakan," demikian menurut Changyong Rhee.

Mengingat adanya penurunan pertumbuhan di sebagian besar kawasan ini, dan adanya lingkungan ekonomi global yang penuh dengan tantangan, *laporan PTPK* merekomendasikan penetapan kebijakan-kebijakan yang mendukung *demand* sambil menurunkan resiko kerentanan. Kebijakan akomodatif harus dipertimbangkan, terutama bagi negara-negara yang memiliki ruang kebijakan dan dimana penurunan pertumbuhannya memiliki komponen jelas yang bersifat siklus atau sementara. Namun kebijakan juga harus berfokus pada peningkatan potensi pertumbuhan dan harus bertujuan untuk mengurangi kerentanan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, laporan Pandangan Terbaru merekomendasikan agar reformasi struktural harus tetap menjadi prioritas dalam usaha mendorong pertumbuhan jangka menengah dengan menyediakan fasilitas investasi dan menciptakan lapangan kerja, serta dengan membantu mengurangi kerentanan jangka pendek. Di Cina, reformasi harus terus membantu menyeimbangkan kembali perekonomian dengan menjauhkan diri dari investasi yang berjalan karena hutang (*debt-fueled investment*). Ini mencakup, antara lain, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perusahaan milik negara (BUMN) maupun swasta, serta meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

"Pelaksanaan yang berkembang secara stabil adalah kunci untuk mengurangi tingkat ketidakpastian kebijakan dan kunci untuk membuka pintu kesempatan agar manfaat pertumbuhan reformasi bisa terwujud," demikian kata Changyong Rhee. Di Jepang, pelonggaran moneter perlu diteruskan, dan pelaksanaan rencana fiskal jangka menengah yang konkrit serta reformasi struktural (misalnya, dalam pasar produksi dan pasar tenaga kerja) harus dipercepat. Di perekonomian perbatasan (*frontier economies*) seperti Vietnam dan Mongolia, reformasi dalam sektor perbankan dan BUMN untuk meningkatkan efisiensi serta pengalokasian modal, tetap merupakan prioritas; sementara di India, diperlukan langkah lebih lanjut untuk mengatasi kemacetan suplai yang berlangsung sudah cukup lama dan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat serta lebih inklusif.

Laporan PTPK tersebut juga menekankan kebijakan *demand* agregat agar mendukung pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan. Stabilisator otomatis harus diizinkan untuk beroperasi secara penuh, kecuali bila ada kebutuhan konsolidasi fiskal yang lebih jelas. Dalam perekonomian yang memiliki ruang fiskal - seperti negara-negara yang berutang rendah dan yang memiliki surplus fiskal yang disesuaikan secara siklus - stimulus fiskal yang telah ditargetkan untuk melawan penurunan *demand* sementara, bisa dikerahkan. Di daerah lain, konsolidasi fiskal secara bertahap harus diteruskan, terutama di sektor eksportir komoditas, tetapi perhatian juga harus diberikan kepada komposisi penyesuaian fiskal.

Analisa dalam laporan PTPK juga mendukung penggunaan kebijakan moneter untuk menopang *demand* di negara yang memiliki inflasi rendah, terutama jika ruang fiskal-nya terbatas. Kebijakan suku bunga (*policy rates*) umumnya sejalan dengan fundamental di sejumlah negara utama Asia, ini menunjukkan bahwa suku bunga bisa diturunkan apabila tingkat pertumbuhan ternyata mengecewakan dan apabila kesenjangan dari hasil negatif (*negative output gaps*) muncul atau melebar. Pada saat yang sama, melemahnya nilai tukar mungkin akan membatasi ruang lingkup pelonggaran moneter.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa kebijakan nilai tukar dan alat makroprudensial akan tetap penting dalam membantu mengelola penyesuaian eksternal dan memperkuat stabilitas keuangan. Nilai tukar harus menjadi penyerap guncangan yang utama, dengan penggunaan cadangan devisa secara bijaksana untuk mengelola volatilitas nilai tukar sementara. Selain itu, intervensi valuta asing seharusnya tidak menghalangi penyesuaian nilai tukar yang diperlukan. Kebijakan makroprudensial harus digunakan untuk memastikan stabilitas keuangan, dengan upaya yang diarahkan untuk memperkuat kerangka pengawasan dan regulasi, terutama pada saat siklus kredit berputar.

Slower but steady

While pace of growth is slowing in Asia, the region is still expected to outperform the global economy in growth prospects.

(year-on-year percent change)

	Actual Data and Latest Projections			Difference from July 2015 WEO update		
	2014	2015	2016	2015	2015	2016
Asia	5.6	5.4	5.4	0.0	-0.2	-0.1
Emerging Asia¹	6.8	6.5	6.3	0.0	-0.1	-0.1
Australia	2.7	2.4	2.9	0.0	-0.4	-0.3
Japan	-0.1	0.6	1.0	0.0	-0.4	-0.2
New Zealand	3.3	2.2	2.4	0.1	-0.7	-0.3
East Asia	6.7	6.2	5.8	0.0	-0.1	-0.1
China	7.3	6.8	6.3	-0.1	0.0	0.0
Hong Kong SAR	2.5	2.5	2.7	0.2	-0.3	-0.4
Korea	3.3	2.7	3.2	0.0	-0.6	-0.3
Taiwan Province of China	3.8	2.2	2.6	0.1	-1.6	-1.5
South Asia	7.2	7.2	7.4	0.1	-0.1	0.0
Bangladesh	6.3	6.5	6.8	0.2	0.2	0.0
India	7.3	7.3	7.5	0.1	-0.2	0.0
Sri Lanka	7.4	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0
Nepal	5.4	3.4	4.4	-0.1	-1.6	-0.6
ASEAN	4.6	4.6	5.0	0.0	-0.5	-0.3
Brunei Darussalam	-2.3	-1.2	3.2	-1.6	-0.7	0.4
Cambodia	7.0	7.0	7.2	0.0	-0.2	0.0
Indonesia	5.0	4.7	5.1	0.0	-0.5	-0.4
Lao P.D.R.	7.4	7.5	8.0	0.0	0.2	0.2
Malaysia	6.0	4.7	4.5	0.0	-0.1	-0.4
Myanmar	8.5	8.5	8.4	0.8	0.2	-0.1
Philippines	6.1	6.0	6.3	0.0	-0.7	0.0
Singapore	2.9	2.2	2.9	0.0	-0.8	-0.1
Thailand	0.9	2.5	3.2	0.2	-1.2	-0.8
Vietnam	6.0	6.5	6.4	0.0	0.5	0.6
Pacific island countries and other small states²	3.5	3.6	3.4	-0.1	-0.4	0.0

Sources: IMF, *World Economic Outlook* database; and IMF staff projections.

¹Emerging Asia includes China, India, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam. India's data are reported on a fiscal year basis.

²Simple average of Pacific island countries and other small states which include Bhutan, Fiji, Kiribati, Maldives, the Marshall Islands, Micronesia, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, Tuvalu, and Vanuatu.

Link-link yang berhubungan

[Baca laporan lengkap](#)

[Mengelola transisi ekonomi di Cina](#)

[Cubitan dari harga komoditas yang menurun](#)

[Masa depan keuangan Asia](#)

[Asia dan IMF](#)